

TESIS

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA CONTOH KASUS (NUSA TENGARA BARAT, SULAWESI SELATAN, SULAWESI UTARA DAN PAPUA)

disusun dan diajukan oleh:

**BUDIANSYAH TAWANG
P0700215004**



Kepada:

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



**Optimization Software:
www.balesio.com**

TESIS

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP
PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA CONTOH KASUS (NUSA
TENGGARA BARAT, SULAWESI SELATAN,
SULAWESI UTARA DAN PAPUA)**

***THE INFLUENCE OF GOVERNMENT SPENDING AND INVESTMENT
IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR,
FOR EXAMPLE (NUSA TENGGARA BARAT,
SULAWESI SELATAN, SULAWESI UTARA AND PAPUA)***

disusun dan diajukan oleh:

**BUDIANSYAH TAWANG
P0700215004**



Kepada:

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INFRASTRUKTUR DAN
INVESTASI TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA
CONTOH KASUS (NUSA TENGGARA BARAT, SULAWESI
SELATAN, SULAWESI UTARA, PAPUA)**

disusun dan diajukan oleh

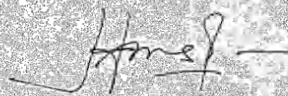
Budiansyah Tawang
P0700215004

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal 9 Agustus 2019 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota



Dr. H. Abd. Hamid Paddu, SE., MA



Dr. Ir. Muh. Djibril Tajibu, SE., M.Si

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiansyah Tawang
NIM : P0700215004
Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Infrastruktur Dan Investasi Terhadap
Pengembangan Sektor Pariwisata Contoh Kasus (Nusa Tenggara Barat,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara Dan Papua)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/diterbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Budiansyah Tawang



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “***Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Infrastruktur dan Investasi Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata Contoh Kasus (Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua)***” yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Master Sains (M.Si). terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari arahan, petunjuk, dan bimbingan serta saran dan kritikan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan . Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Hamid Paddu, SE., MA dan Bapak Dr. Ir. Muhammad Djibril Tajibu, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini serta atas ilmu yang diberikan selama masa studi pada jurusan Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Program Magister, Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unhas.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmatia, M.A, Ibu Dr. Nursini, SE., MA dan juga Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini. Bapak/Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi
3. Kedua orang tua ku, Kakak, dan juga istri terima kasih atas kepercayaan, kesabaran, dukungan moril dan materi serta semangat yang tak pernah



berhenti sehingga menjadi kekuatanku selama menyelesaikan tesis ini. Kalian adalah pelita dalam hidupku.

4. Teman-teman seperjuangan Program Magister, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unhas untuk keceriaan dan kenangan serta telah menjadi bagian dalam perjalanan studiku.
5. Staf akademik Program Magister, Pascasarjana Ekonomi Unhas atas bantuannya dalam mengurus keperluan akademik dan administrasi selama penulis melaksanakan studi.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Makassar, 2 Februari 2019

Budiansyah Tawang



ABSTRAK

BUDIANSYAH TAWANG. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Infrastruktur dan Investasi Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata Contoh Kasus (NTB, Sulsel, Sulut dan Papua) (dibimbing oleh **Abd. Hamid Paddu dan Muh. Jibril Tadjibu**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah, infrastruktur dan investasi terhadap pengembangan sektor pariwisata pada keempat provinsi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu berupa data panel (*pooled data*) yang menggabungkan data lintas daerah (*cross-section*) dan data lintas waktu (*time series*). Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode *Structural Model*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengeluaran Pemerintah dan Infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah Wisatawan sementara Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap Jumlah Wisatawan, pada sisi lain jumlah wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap tenaga kerja sektor pariwisata begitupun dengan kedua variable independen lainnya yaitu Pengeluaran Pemerintah dan Infrastruktur, Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja sektor pariwisata melalui jumlah wisatawan.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Infrastruktur, Investasi, Jumlah Wisatawan dan Tenaga Kerja.



ABSTRACT

BUDIANSYAH TAWANG. The influence of government expending, infrastructure and investation toward tourism sector development for instance (Papua, north Celebes, south Celebes, and west southeast island) (supervised by **Abd. Hamid Paddu and Muh.Jibril Tadjibu**)

This study aimed to analysis impact of government expending, investation and infrastructure toward development tourism sector in to four province.

The analysis unit in this study is Papua, north Celebes, south Celebes, and west southeast island . collecting data using documentation study that is mixed into time series, cross section and pooled data. The data is analysed such as quantitative by using structural model method.

Based on the result of study getting conclusion that infrastructure and government expending has significant positive effect toward of temporary investment tourism number uneffect to number of tourism. In other side number of tourism so significant positive effect in tourism sector worker with the two independents variable like expending of government and infrastructure, investment uneffect undirectly toward tourism sector worker through tourists.

Keywords : Government Expending, Infrasructure, Investment, Tourism and Worker.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Landasan Teori.....	19
2.1.1. Beberapa Catatan Tentang Pengeluaran Pemerintah.....	19
2.1.2. Infrastruktur dan Ragam Defenisi.....	21
2.1.3. Investasi	24
2.1.4. Wisatawan	28
2.1.5. Tenaga Kerja.....	38
2.2. Hubungan Antar Variabel	43
2.3. Studi Empiris.....	49



BAB III	KERANGKA PEMIKIRAN	52
	3.1. Hipotesis	53
BAB IV	METODE PENELITIAN	54
	4.1. Rancangan Penelitian	54
	4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
	4.3. Jenis dan Sumber Data	55
	4.4. Metode Pengumpulan Data	55
	4.5. Metode Analisis Data	56
	4.6. Defenisi Operasional.....	57
BAB V	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL	59
	5.1. Deskripsi dan Obyek Penelitian.....	59
	5.2. Deskripsi Data.....	60
	5.2.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.....	60
	5.2.2 Infrastruktur Sektor Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.....	62
	5.2.3 Investasi Sektor Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.....	64
	5.2.4 Jumlah Wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.....	66
	5.2.3 Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.....	68
	5.3. Deskripsi Hasil Penelitian	70



5.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Wisatawan	71
5.3.2 Pengaruh Infrastruktur Terhadap Jumlah Wisatawan.....	73
5.3.3 Pengaruh Investasi Terhadap Jumlah Wisatawan.....	75
5.3.1 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Tenaga Kerja Sektor pariwisata	78
5.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Melalui Jumlah Wisatawan	80
5.3.2 Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Melalui Jumlah Wisatawan	83
5.3.3 Pengaruh Investasi Terhadap Tenaga Kerja Sektor pariwisata.....	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	97



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan Devisa dari Sektor Pariwisata Tahun 1998-2017.....	2
Gambar 1.2 Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Indikator Makro Ekonomi Di Indonesia Tahun 2007-2016.....	3
Gambar 1.3 Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisman Ke Indonesia Tahun 1989-2017	4
Gambar 1.4 Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016.....	6
Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016	8
Gambar 1.6 Jumlah Armada Bus Pariwisata Sektor Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016	9
Gambar 1.7 Nilai Realisasi Investasi Sektor Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016	11
Gambar 1.8 Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016	13
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran	53



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1. Nilai Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016.....	61
Tabel 5.2. Jumlah Armada Bus Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016.....	64
Tabel 5.3. Realisasi Nilai Investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016.....	66
Tabel 5.4. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016.....	68
Tabel 5.5. Tenaga Kerja Sektor Pariwisata yang Bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016.....	69
Tabel 5.6. Hasil Estimasi Variabel.....	70
Tabel 5.7. Hasil Estimasi Variabel.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Data Regresi Variabel Tesis Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016.....	97
Tabel 2. Data Regresi logaritma natural (ln) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Tahun 2007-2016.....	99
Tabel 3. Output Regresi Variabel Tesis	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelemahan dan ketidakpastian ekonomi global yang tak kunjung bergerak ke titik keseimbangan yang lebih baik berdampak negative pada melemahnya perekonomian Indonesia di hampir beberapa tahun terakhir ini. Jika berkaca pada perekonomian nasional yang masih didominasi oleh sektor-sektor yang bersifat sumber daya alam atau komoditi, melemahnya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi logis di tengah ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global.

Dari berbagai informasi terkait perkembangan global, ketidakpastian global ini akan berlangsung cukup lama. Hal ini semakin terasa ketika Cina mendevaluasi nilai mata uangnya beberapa tahun lalu yang semakin menegaskan adanya *Currency War* di lingkup ekonomi global. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perekonomian Indonesia tidak bisa lagi hanya bergantung pada sektor-sektor komoditi atau sumber daya alam. Sudah saatnya perekonomian nasional di topang oleh sektor-sektor non komoditi salah satunya adalah pariwisata yang tidak begitu terpengaruh oleh perekonomian global.

Hasil kajian UN-WTO (2016), menunjukkan aktivitas pariwisata dunia mengalami perkembangan yang sangat menakjubkan. Jumlah wisatawan dunia meningkat sangat pesat yang hanya sebanyak 25 juta wisatawan di tahun 1950, menjadi sebesar USD 1,1 Milyar pada tahun 2015. Begitupun pendapatan yang

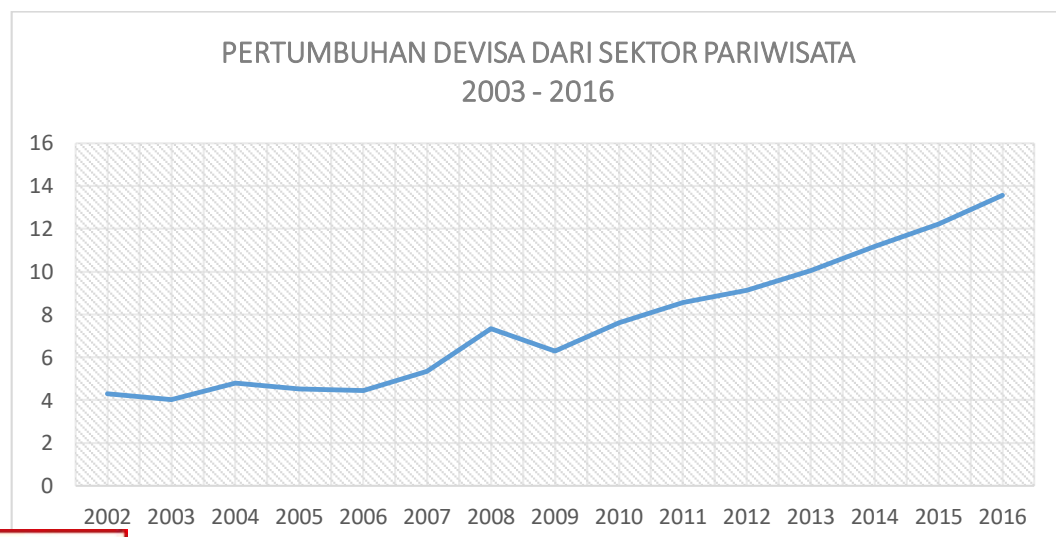
dari sektor ini, dari sebesar USD 2 Milyar di tahun 1950 menjadi sebesar Triliun di tahun 2015



Lebih lanjut kondisi pariwisata yang sedemikian pesat berimbas pada kawasan Asia-Pasifik, dalam satu dekade ke belakang. Selama periode 2005-2015 kedatangan wisatawan di kawasan ini tumbuh mencapai 6,1%, jauh lebih pesat dari perkembangan pariwisata dunia yang hanya 3,9%. Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara memberikan kontribusi terbesar dengan laju pertumbuhan wisatawan masing-masing sebesar 8,4% dan 7,9% dalam satu dekade ke belakang. Kawasan Asia Tenggara berkontribusi sebesar 8,8% terhadap kedatangan wisatawan dunia dan merupakan urutan kedua setelah kawasan Timur Laut Asia yang mampu mendatangkan wisatawan sebanyak 12% dari jumlah wisatawan dunia tahun 2015. (Sutyastie, Sihono dan Bagdja 2016:1)

Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam memberikan sumbangan devisa bagi negara. Aktivitas pariwisata merupakan salah satu bentuk ekspor perdagangan jasa, dimana sektor pariwisata merupakan satu-satunya sektor yang secara konstan memberikan kontribusi positif dalam neraca perdagangan jasa Indonesia.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Devisa dari Sektor Pariwisata

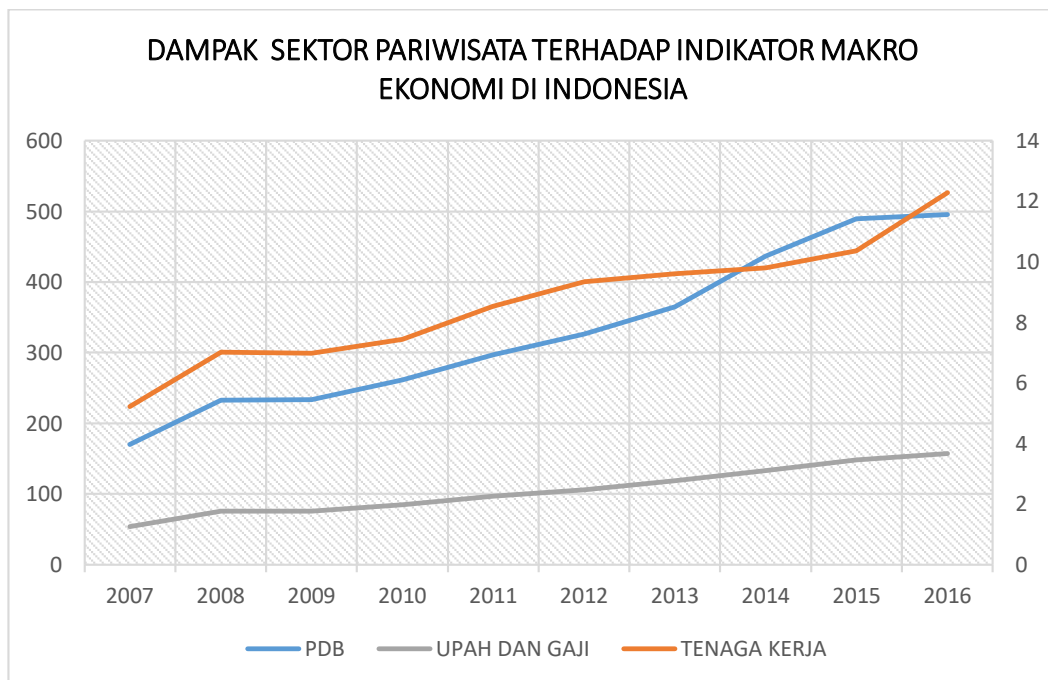


S 2017



Kemenparekraf (2012) menyatakan bahwa selain sebagai penghasil devisa, sektor pariwisata juga berkontribusi pada beberapa indikator makro ekonomi di suatu Negara, sektor makro ekonomi tersebut antara lain: nilai tambah sektoral yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), upah dan gaji yang berkontribusi terhadap tingkat upah nasional dan penciptaan kesempatan kerja yang berkontribusi terhadap jumlah lapangan kerja nasional.

Gambar 1.2. Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Beberapa Indikator Makro

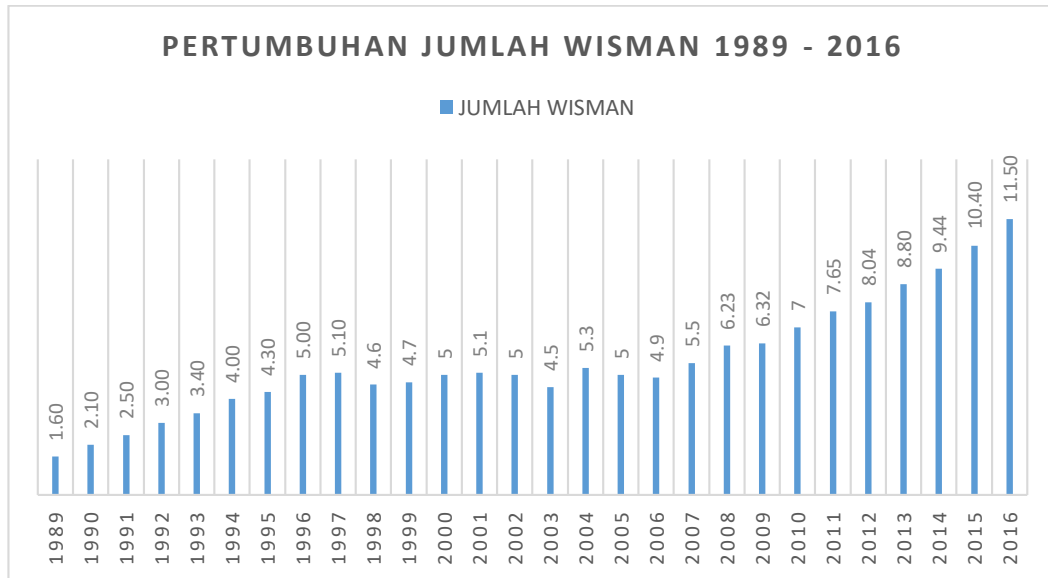


Sumber: Nesparnas 2017

Berdasarkan data pada Gambar 1.2, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata paling tinggi adalah dalam penciptaan lapangan kerja, di mana nilainya mengalami peningkatan antar tahun. Sedangkan, kontribusi terhadap indikator makro ekonomi lainnya relatif stagnan walaupun dengan nilai yang meningkat setiap tahun. Besarnya sumbangan sektor pariwisata terhadap devisa negara dan indikator makro ekonomi terutama dipengaruhi besarnya permintaan sektor pariwisata itu sendiri.



Gambar 1.3. Grafik Pertumbuhan Permintaan Pariwisata Indonesia yang Diukur dari Jumlah Kedatangan Wisman.



Sumber : BPS 2017

Bersandar pada data tersebut dimana permintaan atas pariwisata Indonesia memiliki tren pertumbuhan kearah yang positif maka menurut IUOTO (International Union Of Official Travel Organization) yang dikutip oleh spillane (1993), pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama yaitu (1) pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international.(2) pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi akomodasi dan jasa-jasa pelayanan lainnya.(3) perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi.(4) pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi.(5) penghasil devisa.(6) pemicu perdagangan internasional.(7) pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga pendidikan yang khusus membentuk jiwa yang handal dan santun dan.(8) pangsa pasar bagi produk lokal



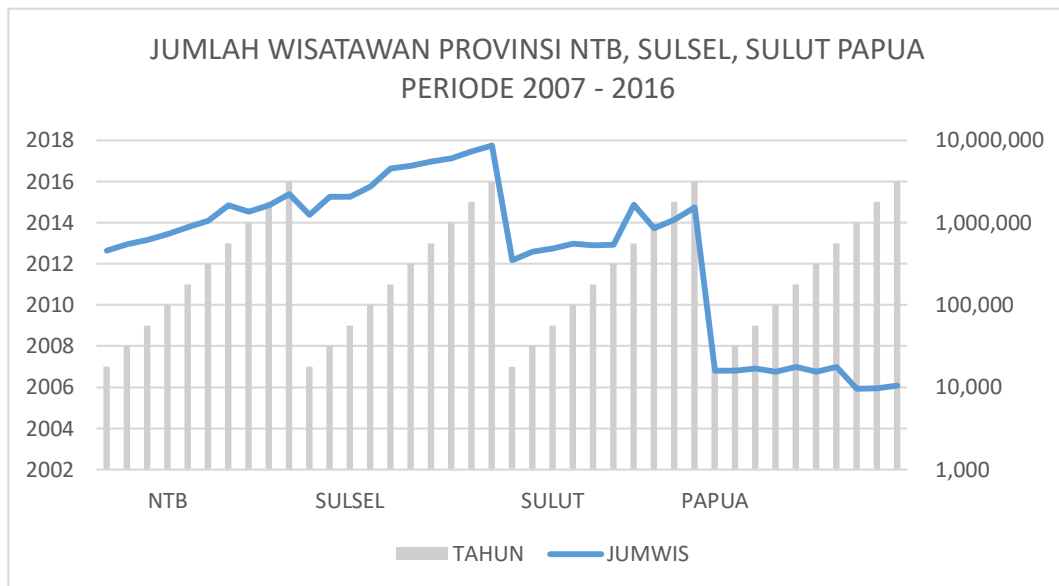
sehingga aneka produk terus berkembang seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Perkembangan pariwisata dan pertumbuhannya telah menjadi bukti nyata bahwa industri pariwisata dapat dijadikan sebagai sektor pendukung peningkatan ekonomi yang baik. Pada pemetaan kondisi lapangan, pada dasarnya terdapat banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan namun terbatasnya sumberdaya sehingga banyak diantaranya masih belum tergarap. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar namun belum dikembangkan secara optimal adalah beberapa daerah di Indonesia bagian timur, tercatat, terdapat ratusan objek wisata yang tersebar di berbagai lokasi, baik berupa objek wisata komersial maupun objek wisata peninggalan bersejarah. Berdasarkan catatan statistik Kemenpar, total jumlah objek wisata pada keempat daerah yang berada lingkup penelitian berjumlah 381 dengan rincian Nusa Tenggara Barat 96 tempat wisata, Sulawesi Selatan sebanyak 51 tempat wisata, Sulawesi Utara 131 tempat wisata dan Papua berjumlah 103. Sebagian besar objek wisata tersebut dikelola oleh pihak swasta atau non-pemerintah.

Nursyamsi (2015) mendefinisikan bahwa Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata suatu wilayah dapat digambarkan dengan seberapa banyak wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut, begitu pula sebaliknya. Mengacu pada data yang dipublikasikan oleh badan pusat statistik indonesia pada beberapa daerah kawasan timur Indonesia masih ditemukan kendala dalam pengembangannya, hal tersebut jika diukur dari arus wisatawan yang berkunjung ke empat provinsi.



Gambar 1.4. Grafik pertumbuhan Jumlah Wisatawan pada Provinsi Nusa Tenggara barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua



Sumber : BPS 2017

Terlihat pada Gambar 1.4, arus kunjungan wisatawan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan trend yang positif namun berbeda halnya pada kedua kawasan lain yang berada pada ruang lingkup penelitian ini yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua yang justru menunjukkan trend yang berkebalikan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua tidak saja memiliki landscape pemandangan alam memuaskan tapi juga budaya masyarakat lokal yang masih kental, penduduk yang mengesankan, makanan yang khas, dan tentu saja lingkungan yang masih alami dengan udara yang bersih tanpa polusi. Peran dan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam konteks mendorong pertumbuhan pariwisata menjadi salah satu kunci sukses kedepan. Hal ini menjadi penting, mengingat bahwa urusan bidang pariwisata merupakan urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah



dan wisatawan merupakan kombinasi yang kuat dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata yang semakin baik pada suatu daerah. Pola pengelolaan daerah tujuan wisata yang tidak efektif malah dapat menurunkan jumlah kunjungan wisatawan untuk berkunjung dan menimbulkan efek negatif terhadap daerah wisatanya itu sendiri.

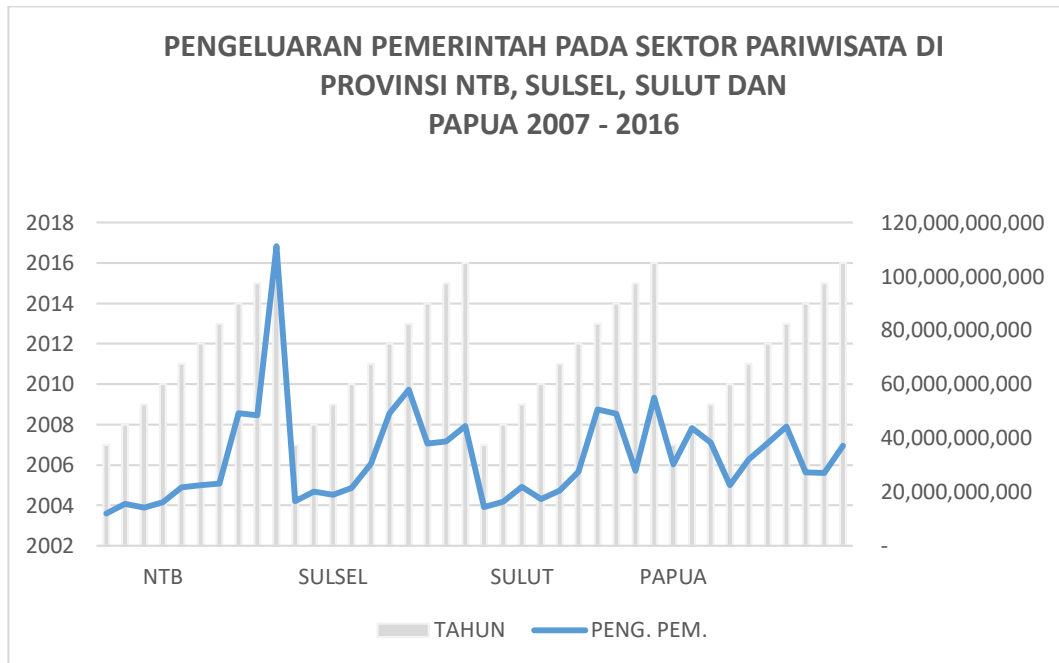
Menurut Hunt (1990) yang melihat hubungan antara pertumbuhan anggaran dan pangsa pasar pengeluaran pariwisata, bahwa dalam waktu 10 tahun antara 1975-1976 dan 1984-1985, dia menemukan bahwa negara-negara yang memiliki pertumbuhan anggaran yang paling kontras mendapatkan pertumbuhan pangsa pasar yang positif dan sebaliknya, negara-negara yang pertumbuhan anggarannya rendah telah kehilangan pangsa pasarnya begitu pula dengan Rantetadung (2012) yang mengatakan bahwa adanya dukungan alokasi dana dari pemerintah disetiap tahunnya menjadikan sektor pariwisata dapat berkembang dan makin banyak dikunjungi oleh wisatawan.

Pada kondisi dikawasan timur khususnya pada daerah-daerah yang berada pada ruang lingkup penelitian ini, porsi alokasi anggaran sektor pariwisata dalam sepuluh tahun terakhir cenderung naik disetiap tahunnya pada keempat daerah misalnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencatat angka tertinggi pada rata-rata persentase 35% lalu diikuti Provinsi Sulawesi Utara 24%, Sulawesi Selatan 15% dan Papua 7%, jika dikomparasikan dengan data diatas, porsi alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan perkembangan yang positif, trendnya meningkat setiap tahunnya sementara Jumlah wisatawan yang relatif kecil, ini menandakan bahwa pengelolaan pariwisata beberapa daerah dikawasan timur indonesia perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah,

at potensi kekayaan alam dikawasan ini yang begitu melimpah.



Gambar 1.4. Grafik Nilai Realisasi Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi Nusa Tenggara barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua



Sumber : Kemenkeu 2017

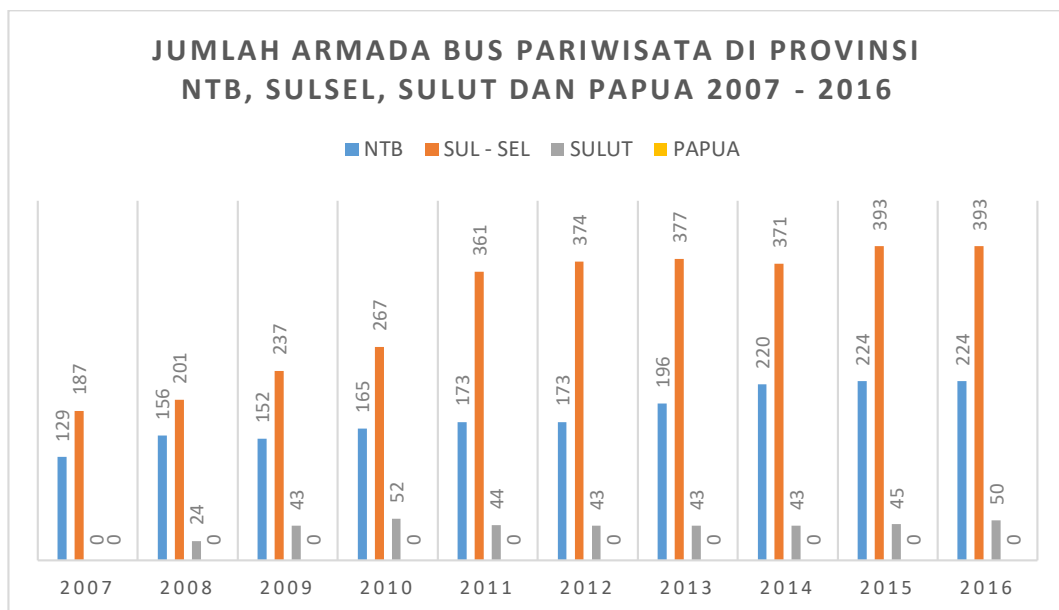
Keinginan wisatawan untuk berwisata bukan menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan mengingat semakin maraknya promosi objek wisata dan semakin murah nya jasa penunjangnya baik akomodasi dan transportasi. Kemajuan fasilitas transportasi ikut mendorong kemajuan bidang kepariwisataan dan sebaliknya. Ekspansi dalam industri pariwisata dapat meningkatkan permintaan transportasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Fungsi utama transportasi sangat erat hubungannya dengan aksesibilitas (*accessibility*). Aksesibilitas berkaitan dengan frekuensi penggunaan dan kecepatan yang dimiliki oleh angkutan sehingga jarak lokasi yang jauh menjadi terasa lebih dekat. Hal ini berarti mempersingkat waktu

dan sudah tentu akan lebih meringankan biaya perjalanan. Dengan dapat dikatakan transportasi dapat semakin memudahkan orang untuk



mengunjungi suatu daerah tertentu, seperti misalnya daerah tujuan wisata. Menurut Hall (1999) transportasi terbagi atas empat peran: 1) angkutan untuk sampai ke lokasi tujuan, 2) angkutan memastikan mobilitas di dalam tujuan, 3) mobilitas di dalam pertunjukan wisata dan 4) perjalanan sepanjang jalur daerah rekreasi. Jelaslah, transportasi tidak hanya merupakan alat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga membentuk suatu daya pikat tersendiri pada sektor pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh Sudiarta (2005) di Desa Sarangan Bali menyatakan bahwa akses transportasi dapat meningkatkan perkembangan wisata serta peningkatan jumlah wisatawan karena akses menuju wilayah perkotaan menjadi semakin lancar dan biaya yang ditimbulkan semakin murah.

Gambar 1.6. Grafik Pertumbuhan Jumlah Armada Bus Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua



Sumber : Kemenhub 2017



ada kawasan yang diteliti, ada perbedaan yang cukup kontras pada infrastruktur khususnya pada moda transportasi darat, dalam kurun

sepuluh tahun terakhir kondisi pertumbuhan jumlah armada bus provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara terus meningkat, kondisi ini berbeda pada Provinsi Papua yang mencatatkan angka nihil.

Kegiatan pariwisata atau dalam perekonomian yang sering dikatakan ekonomi pariwisata dikategorikan dalam *demand-side economy*, yang artinya menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa ekonomi pariwisata dalam perspektif makro ekonomi (*agregat demand*).

Selama berwisata, wisatawan akan berbelanja sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*tourism final demand*) pasar barang dan jasa selanjutnya *final demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*investment derived demand*) untuk berproduksi dalam memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut.

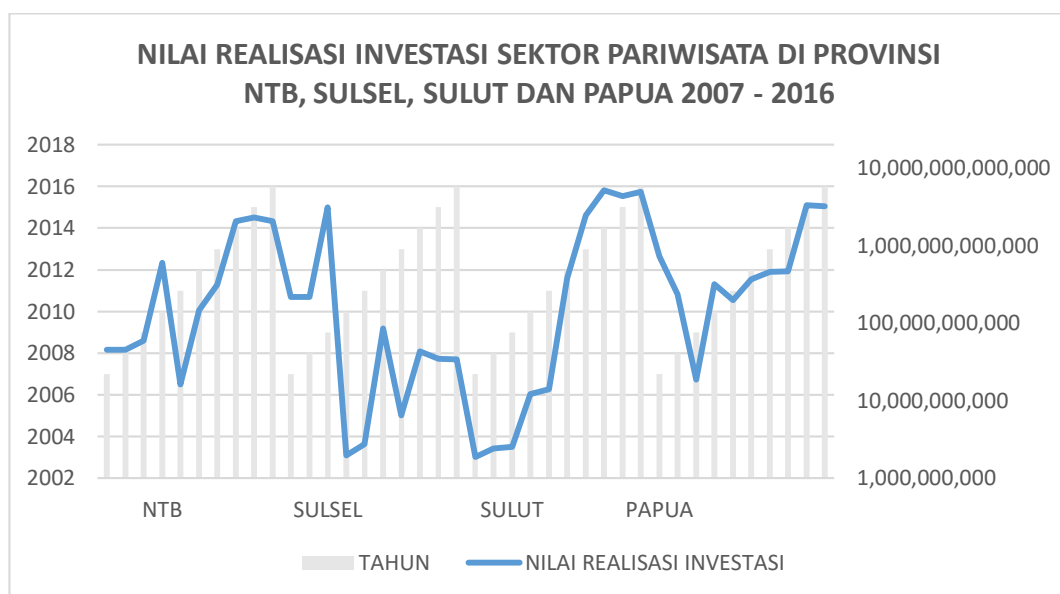
Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan, restoran dan lain-lain. Peningkatan investasi di sektor hotel, restoran dan akomodasi lain yang memiliki nilai keterkaitan tinggi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah sehingga mampu untuk meningkatkan lapangan kerja serta kesempatan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan mampu untuk mendorong dan menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Dana yang dimiliki pemerintah yang terbatas maka pemberian investasi akan lebih efektif apabila

pada sektor yang merupakan sektor unggulan di daerah atau suatu
Pada penemuan fakta dilapangan didapatkan bahwa nilai realisasi pada



seluruh kawasan yang diteliti mengalami pertumbuhan yang positif meskipun nilai ini sempat mengalami penurunan ditahun-tahun tertentu misalnya provinsi papua ditahun 2011 namun secara keseluruhan dalam sepuluh tahun terakhir pertumbuhan nilai realisasi investasi pada keempat wilayah menunjukkan trend yang positif. Selengkapnya trend ini dapat diamati pada Gambar berikut.

Gambar 1.7. Grafik Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi Sektor Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua



Sumber : BPS 2017

Kepariwisataan menjadi salah satu kunci permasalahan perekonomian pada negara-negara yang menganggap penting dari pertumbuhan pariwisata itu sendiri. Pada perkembangan global sekarang ini, pariwisata menjadi salah satu solusi yang baik dalam menciptakan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja pada industri-industri besar dan kecil memiliki keterbatasan, sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sumber penyerapan tenaga



kerja yang lebih baik untuk mengatasi jumlah pengangguran yang selalu meningkat.

Kegiatan pariwisata beserta pengeluarannya dalam melakukan aktivitas seperti perjalanan rekreasi, menginap di hotel, serta penggunaan fasilitas jasa-jasa hiburan lainnya yang dilakukan baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara akan memberikan penghasilan bagi sektor-sektor terkait. Disamping itu permintaan wisatawan terhadap barang dan jasa akan merangsang pertumbuhan produksi dan peningkatan pendapatan nasional atau regional baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pariwisata berperan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga dan mampu menurunkan angka pengangguran suatu wilayah.

Sebagai contoh, Hasil studi pada dampak pembangunan pariwisata di Tripura, India menunjukkan bahwa industry pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mampu menciptakan peluang kerja dari peluang kerja untuk tenaga yang tidak terdidik sampai dengan tenaga yang sangat terdidik. Pariwisata juga menyediakan peluang kerja diluar bidang pariwisata khususnya peluang kerja bagi mereka yang berusaha secara langsung pada bidang pariwisata dan termasuk juga bagi mereka yang bekerja secara tidak langsung terkait industry pariwisata seperti usaha-usaha pendukung pariwisata; misalnya pertanian sayur mayur, peternak daging, supplier bahan makanan, yang akan mendukung operasional industry perhotelan dan restoran. Sedangkan menurut Mitchell dan Ashley dalam I Gusti Bagus (2011) menyatakan bahwa sumbangan pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja jika dibandingkan

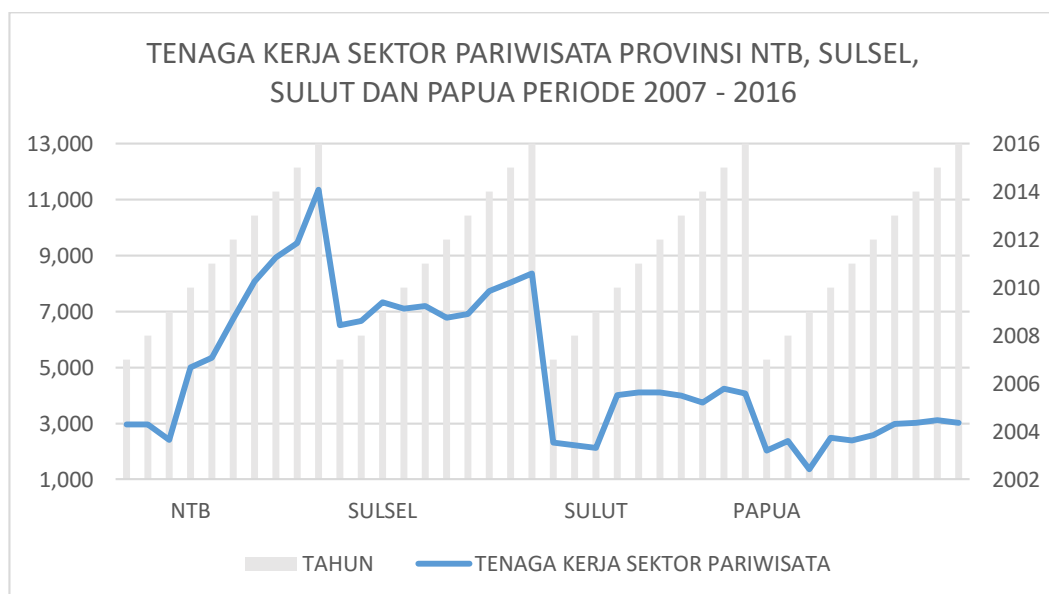
sektor lainnya menunjukkan angka yang cukup berarti, dan indeks



terbesar terjadi di Negara New Zealand sebesar 1,15 disusul oleh Negara Philipines, kemudian Chile, Papua New Guinea, dan Thailand sebesar 0,93.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya dalam sepuluh tahun terakhir tingkat penyerapan tenaga kerja pada kawasan ini menunjukkan trend yang positif namun berbeda halnya pada ketiga kawasan lain yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua yang justru mencatatkan angka yang relative stagnan, ini tentunya diluar pakem mengingat berbagai penelitian yang mendukung adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan pariwisata dan jumlah serapan tenaga kerja. Selengkapnya data ini disajikan pada grafik berikut

Gambar 1.8. Grafik Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Sektor Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua



Sumber : BPS 2017

(Kartajaya dan Yuswohady 2005:29) mengatakan bahwa “pada dasarnya pariwisata mencakup kegiatan lintas sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan mencakup lintas bidang seperti politik, hukum, ekonomi dan



kebudayaan sehingga kegiatan pariwisata dijadikan sebagai sektor yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya ekonomi dan budaya yang dimiliki oleh daerah". Kemampuan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan bidang pariwisata terutama nasional dalam upayanya untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan kegiatan pariwisata terhadap lintas bidang menyebabkan industri pariwisata sensitif terhadap perubahan (*shock*) yang terjadi baik faktor internal maupun eksternal. Baik gangguan internal dan eksternal tersebut akan sangat berpengaruh pada kondisi pasar. *Shock* yang didorong oleh teknologi, perkembangan kondisi ekonomi, perubahan politik dan regulasi pemerintah, pergeseran sosial budaya, ujung-ujungnya akan berdampak pada perubahan pasar. Kondisi tersebut mengharuskan penguatan kebijakan dan mendorong pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik dalam pembangunan pariwisata dengan melibatkan lintas bidang dan semua *stakeholder* dimana pada akhirnya pengorganisasian kepariwisataan di tiap-tiap daerah di Indonesia akan memegang peranan penting bagi keberhasilan pembangunannya.

Ekonomi pariwisata seperti yang dijelaskan sebelumnya tercipta karena adanya permintaan kebutuhan terhadap konsumsi wisatawan dan investasi pariwisata yang harus dipenuhi oleh sektor-sektor penyedia barang dan jasa. komponen-komponen permintaan tersebut berdasarkan teori *agregat demand* mempunyai koefisien *multiplier* terhadap *output*, pendapatan dan tenaga kerja sehingga ekonomi pariwisata sebagai subset dari *agregat demand* pastinya memiliki kemampuan dalam mempengaruhi *output*. Besarnya kemampuannya tergantung pada besarnya permintaan yang diciptakan oleh pariwisata serta besarnya pengeluarannya. Persoalan selanjutnya adalah seberapa jauh peranan pariwisata dalam mempengaruhi atau mendorong perekonomian



secara keseluruhan. Dalam mengukur pengaruh dari ekonomi pariwisata tersebut harus menggunakan instrumen pengukuran dan analisis yang menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis “***Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Infrastruktur dan Investasi Terhadap Pengembangan Sector Pariwisata Contoh Kasus (Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua)***”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat rumusan masalah sebagai berikut

- a. Apakah pengeluaran pemerintah, infrastruktur dan investasi berpengaruh terhadap jumlah wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua?
- b. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap tenaga kerja sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua?
- c. Apakah pengeluaran pemerintah, infrastruktur dan investasi berpengaruh terhadap tenaga kerja sektor pariwisata melalui jumlah wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dampak pengeluaran pemerintah, Infrastruktur dan Investasi terhadap



pengembangan sector pariwisata pada beberapa daerah di kawasan timur indonesia. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, infrastruktur dan investasi terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap tenaga kerja sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, infrastruktur dan investasi terhadap tenaga kerja sektor pariwisata melalui jumlah wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.

I.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan kepada FEB UNHAS, khususnya Instansi pemerintah daerah masing–masing dalam rangka memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap penelitian
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak – pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenaan dengan penelitian ini



I.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai masalah yang akan diteliti yakni fenomena yang terjadi di lapangan (ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan), data yang berhubungan dengan alasan mengapa ingin meneliti objek tersebut, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, serta manfaat yang diperoleh dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan teori yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis masalah penelitian untuk memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan membahas tentang kerangka pemikiran yang mencakup variabel-variabel yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi lokasi penelitian yaitu pada beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia, populasi dan sampel, jenis dan metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pendekatan penelitian, dan bagan alur penelitian.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai penemuan utama dari penelitian, penjelasan mengenai apakah penemuan dari penelitian mendukung



atau menolak teori yang sudah ada, interpretasi data serta pembahasan dan pemaparan hasil dari temuan penelitian

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan inti yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori. Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti. Menurut Singarimbun (1995:47) “teori merupakan serangkaian asumsi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep, dengan adanya kerangka teori akan mempermudah peneliti dalam menganalisa masalah penelitian”. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut pandang mana penelitian akan disoroti.

2.1.1 Beberapa Catatan Tentang Pengeluaran Pemerintah

“Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut”. Mangkoesoebroto (1994).

Dumairy (1997) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari

an diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran ah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak



pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.

Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan

menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor



industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebelumnya telah disampaikan beberapa konsep yang dijadikan sebagai teori dasar dalam membangun model antara infrastruktur, pertumbuhan dan kemiskinan.

2.1.2 Infrastruktur dan Ragam Defenisi

Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai defenisi infrastruktur. Namun secara bahasa dalam kamus besar bahasa indonesia infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sanitasi, transportasi dsb.

Lebih lanjut *The routledge dictionary of economics (1995)* memberikan pengertian bahwa infrastruktur merupakan pelayan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung.

Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan (Adisasmita, 2011:7). Peranan infrastruktur di bidang transportasi antara lain untuk mengatasi hambatan – hambatan yang mengganggu kelancaran

ang dan manusia baik melalui moda darat, laut, dan udara (Susanto,



Infrastruktur ekonomi mempunyai peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perbedaan infrastruktur juga seringkali didasarkan pada investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. Pembahasan tentang infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik. Dengan memahami sifat infrastruktur sebagai barang publik, maka berdasarkan teori infrastruktur memiliki karakter eksternalitas. Kondisi ini sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung.

Canning dan Pedroni menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dsb memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. Eksternalitas positif pada infrastruktur yaitu berupa efek limpahan (*Spillover Effect*) dalam bentuk peningkatan produksi perusahaan-perusahaan dan sektor pariwisata tanpa harus meningkatkan input modal dan tenaga kerja ataupun juga meningkatkan level teknologi. Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas perusahaan dan sektor pariwisata akan meningkat. Salah satunya yang paling terlihat adalah pembangunan jalan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya harus diatur oleh pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi,

infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pertambangan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur di atas



dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena bersifat dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah tentang penyediaannya. Peran infrastruktur penting guna menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi dengan daerah penyangganya. Di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti di lereng-lereng gunung atau lembah yang menawarkan pemandangan panorama keindahan, biasanya penduduknya hidup dalam kemiskinan dan terisolasi dari gerak maju pembangunan. Dengan kendala kondisi geografi yang sedemikian itu, maka peran infrastruktur sangat sentral dalam membuka akses menuju tempat wisata. Disinilah pembangunan infrastruktur dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan, yakni dengan meningkatkan akses bagi wisatawan untuk mengunjungi lokasi tersebut dan membelanjakan uangnya di daerah tersebut. Akses yang lebih baik akan mampu mengurangi biaya hidup, meningkatkan pendapatan, dan membuka kesempatan bagi kaum miskin untuk mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan pariwisata.

Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang di kembangkan atau dibutuhkan oleh agen – agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Grigg dalam Kodoatie (2003) menyatakan bahwa Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan

ekonomi masyarakat.



The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, *pertama*, Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). *Kedua*, Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. *Ketiga*, Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

2.1.3 Investasi

“Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*Sustainable Development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi disemua sektor ekonomi, dan untuk kegiatan pembangunan tersebut maka diperlukan dana untuk membiayainya yang disebut dengan dana investasi”. Tambunan (2001).

Sukirno (2000) mengatakan bahwa Investasi merupakan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu. Penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Dengan adanya penambahan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah, dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan

produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga terjadi pemerataan pendapatan perkapita..



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, definisi penanaman modal atau dalam hal ini investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa investasi terbagi menjadi dua, yaitu PMDN dan PMA yang dapat didefinisikan sebagai berikut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Sadono Sukirno (2004) investasi merupakan pengeluaran - pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Sedangkan menurut *Case and Fair (2007)*, investasi adalah aliran yang meningkatkan persediaan modal. Meskipun modal diukur pada titik waktu tertentu (suatu persediaan), investasi diukur atas periode waktu (suatu aliran). Aliran investasi meningkatkan persediaan (simpanan) modal.

Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung, peralatan ataupun berbagai kegiatan usaha yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu Negara atau lebih khususnya dalam hal ini

kan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan



meningkat. Dapat disimpulkan bahwa investasi memiliki peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan.

Dalam Teori Harrod-Domar investasi dan *the incremental output ratio* (*ICOR*) merupakan dua variabel fundamental. Tambunan (2001). Investasi dimaksud adalah investasi *netto*, yaitu perubahan/penambahan stok barang modal *ICOR* adalah kebalikan dari rasio pertumbuhan *output* terhadap pertumbuhan investasi, yang pada intinya menunjukkan hubungan antara penambahan stok barang modal dan pertumbuhan *output*, atau melihat seberapa besar peningkatan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Model pertumbuhan Harrod-Domar jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s , serta rasio modal-output nasional, k . Sederhananya, agar bisa tumbuh dengan pesat, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP-nya. Semakin banyak yang ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat”. Todaro (2006)

Penanaman modal (investasi) merupakan langkah awal proses produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya suatu sektor ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap Negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Dumairy (1996).

danya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal hingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan



pekerjaan baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian akan menambah output dan pendapatan baru pada faktor produksi akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan industri pariwisata salah satunya diukur dengan besarnya investasi yang ditanamkan pada industri tersebut. Jenis-jenis investasi pada industri pariwisata dibagi menjadi tiga, yaitu investasi modal pribadi, investasi pemerintah, dan investasi swasta. Investasi modal pemerintah cenderung terkait dengan pembangunan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan) dan pusat-pusat konvensi. Investasi modal pribadi biasanya diwujudkan dalam bentuk sarana akomodasi non hotel, sedangkan investasi swasta cenderung berupa sarana akomodasi hotel dan transportasi.

Begitu juga dengan investasi di industri pariwisata, salah satunya yaitu investasi pada usaha perhotelan yang diharapkan mampu mengembangkan pembangunan atau pendirian hotel-hotel baru atau pengadaan kamar-kamar pada hotel-hotel yang sudah ada. Dengan tersedianya hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Pembayaran atas pelayanan hotel yang diterima oleh wisatawan akan meningkatkan pendapatan usaha perhotelan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan salah satu komponen dari PAD industri pariwisata. Dapat disimpulkan bahwa investasi di industri pariwisata berpengaruh secara tidak

terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata.



2.1.4 Wisatawan

Kata 'wisatawan' merujuk pada orang. Perbedaannya dengan yang bukan wisatawan adalah pada perilakunya, sehingga penetapan wisatawan didasarkan pada prasangka perilakunya yang dapat diamati. Pitana (2009) menyebutkan terdapat empat atribut yang esensial dalam konteks perilaku wisatawan yang bisa diterima secara luas, yaitu: (1) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya untuk mengunjungi tempat atau negara lain, (2) setiap perjalanan wisata memiliki durasi minimum tetapi bersifat sementara dan bukan untuk menetap di tempat baru yang dituju, (3) perilaku wisata muncul dalam waktu luang, dan (4) perjalanan wisata melibatkan hubungan emosional antara wisatawan dengan beberapa karakteristik tempat yang dikunjungi.

Leiper (1990) dalam Pitana (2009) membuat kriteria perilaku wisatawan berdasarkan konsep definitif, sebagai berikut:

A tourist can be defined, in behavioral terms, as a person traveling away from their normal residential region for a temporary period, staying away at least one night but not permanently, to the extent that behavior involves a search for leisure experiences from interaction with features or environmental characteristics of the place(s) they choose to visit

Definisi mengenai wisatawan secara teknikal biasanya digunakan dalam perspektif kepentingan tujuan bisnis, organisasi, statistik, hukum dan sebagainya dalam suatu wilayah atau negara. Salah satu contoh definisi wisatawan secara teknikal adalah definisi yang dibuat oleh *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* dengan menggunakan istilah yang dikeluarkan oleh *The*

Committee of Statistical Experts of the League of Nations pada tahun 1937 yang menyatakan bahwa Wisatawan adalah setiap orang yang mengunjungi suatu



negara selain negara di mana dia biasanya tinggal, dan dengan periode setidaknya 24 jam. Adapun beberapa kriteria yang bisa dianggap sebagai wisatawan adalah *pertama*, Orang-orang yang bepergian untuk tujuan bersenang-senang, alasan keluarga, untuk tujuan kesehatan dan lain sebagainya. *Kedua*, Orang-orang yang bepergian untuk mengadakan pertemuan atau mewakili kedudukan sebagai diplomat, misi keagamaan, dan orang-orang yang bepergian dengan alasan dagang. *Ketiga*, Orang-orang yang singgah dalam pelayaran lautnya, sekalipun bila mereka tinggal kurang dari 24 jam.

Adapun mereka yang tidak dapat dianggap sebagai wisatawan adalah *pertama*, Orang yang datang baik dengan dasar kontrak maupun tidak, untuk mencari kerja atau yang bekerja pada suatu aktivitas usaha di negara tersebut. *Kedua*, Orang lain yang datang untuk menetap menjadi penduduk di negara tersebut. *Ketiga*, Pelajar yang mondok di rumah pemonjakan atau asrama. Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa secara teknis, pengertian mengenai wisatawan seharusnya memuat beberapa hal, diantaranya: (a) tempat tinggal asal wisatawan dan lokasi tujuan wisatanya, (b) jangka waktu dan jarak perjalanan, (c) tujuan dan kepentingan melakukan perjalanan.

2.1.4.1 Konsep Permintaan dan Penawaran Dalam Pariwisata

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi sangat disayangkan bahwa barang – barang kebutuhan manusia itu sangat terbatas (*limitedresources*), oleh karena itu konsumen selalu memilih produk yang

sesuai dengan uang yang dimilikinya. Bilamana keinginan untuk suatu barang atau produk dengan sejumlah uang, maka hal itu dapat



disebut dengan istilah *demand* (permintaan). Umumnya konsumen melihat suatu produk itu dalam bentuk suatu rangkaian manfaat/*benefits* (Yoeti, 2003:28). Permintaan (*demand*) adalah sejumlah barang ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu. Dalam ilmu ekonomi permintaan adalah keinginan seseorang terhadap suatu barang tertentu yang diikuti kekuatan untuk membeli (*purchasing power*).

Permintaan sebagai konsep mengandung makna berlakunya hukum tingkah laku terhadap beberapa variabel diantaranya kualitas produk, harga, dan kegunaan atau manfaat barang bagi pemakainya (Yoeti, 2006:107). Dalam industri pariwisata, sifat dan karakter permintaan untuk melakukan perjalanan wisata sangat berbeda dengan permintaan untuk produk barang, sifat dan karakter itu adalah (a) *Elasticity* artinya permintaan bersifat sangat elastic, (b) *Sensitivity* adalah permintaan sangat peka atau sensitif terhadap keadaan sosial, politik, dan keamanan suatu daerah yang akan dikunjungi, (c) *Seasonality* adalah permintaan ditentukan oleh musim, (d) *Expansion* adalah permintaan meningkat terus sepanjang tahun karena kemajuan teknologi, bertambahnya pendapatan, dan waktu luang.

Sukaatmadja (2010) Hukum permintaan menyatakan bahwa suatu hubungan kebalikan terhadap harga suatu produk yang diminta pembeli, jika yang lainnya tetap sama. Hukum permintaan digambarkan dalam bentuk grafik yang dikenal sebagai kurva permintaan, dimana sumbu y sebagai harga produk dalam satuan uang dan sumbu x sebagai jumlah produk yang diminta.

Penawaran/*supply* dalam ilmu ekonomi adalah sejumlah barang, produk, dan kondisi yang tersedia dalam pasar untuk dijual kepada orang yang membelinya. Dalam industri pariwisata penawaran meliputi semua produk yang



dihasilkan kelompok perusahaan termasuk dalam kelompok industri pariwisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan, baik kepada mereka yang datang secara langsung atau melalui perantara seperti agen perjalanan (Yoeti, 2006:91). Menurut Sukarsa (2010) penawaran adalah kuantitas barang ekonomi yang tersedia di pasar dengan maksud untuk dijual dengan harga tertentu, sedangkan permintaan pariwisata adalah hubungan berbagai jumlah barang dan jasa wisata yang dapat dibeli dengan masing – masing harga pada suatu periode tertentu.

Sedangkan menurut Sukaatmadja (2010) Hukum penawaran menyatakan bahwa terdapat suatu hubungan yang positif antara harga suatu produk yang ditawarkan produsen, jika hal lainnya tetap sama (*ceteris paribus*). Hukum penawaran biasanya digambarkan dalam bentuk grafik yang dikenal dengan kurva penawaran, dimana sumbu y sebagai harga produk dalam satuan uang dan sumbu x sebagai jumlah produk yang dijual. Variabel lain yang mempengaruhi penawaran adalah kebijakan pemerintah menurunkan pajak untuk mendorong pembangunan pariwisata, atau biaya untuk penyediaan produk menurun.

A. Penawaran Pariwisata

Penawaran pariwisata mencakup hal-hal yang ditawarkan oleh daerah destinasi pariwisata kepada wisatawan yang real maupun yang potensial. Penawaran dalam pariwisata menunjukkan suatu atraksi wisata alamiah dan buatan manusia, jasa-jasa maupun barang-barang dapat menarik wisatawan untuk datang mengunjungi suatu kawasan wisata. Menurut Heriawan (2004), sektor inti dari pariwisata mencakup: hotel, restoran, transportasi domestik dan

industri kerajinan (souvenir), jasa hiburan, rekreasi dan budaya, serta biro (paket *tour*). Menurut Salah Wahab (1976), pada umumnya, penawaran



pariwisata mencakup yang ditawarkan oleh destinasi pariwisata kepada wisatawan yang real maupun yang potensial. Penawaran dalam pariwisata menunjukkan khasanah atraksi wisata alamiah dan buatan manusia, jasa-jasa maupun barang-barang yang kira-kira akan menarik orang untuk mengunjungi suatu negara tertentu.

Menurut Damanik dan Webber (2006) mengatakan bahwa elemen penawaran wisata terbentuk atas **triple A**, yang terdiri dari (a) *Atraksi* dapat diartikan sebagai objek wisata (baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*) yang memberikan kenikmatan kepada wisatawan. Atraksi dapat dibagi menjadi tiga, yakni alam, budaya, dan buatan. Atraksi alam meliputi pemandangan alam, seperti Pulau Bunaken di Manado atau Taman Nasional Lorentz, udara sejuk dan bersih, hutan perawan, sungai, gua, dan lain-lain. Atraksi budaya meliputi peninggalan sejarah seperti persebaran budaya Sasak di Lombok, adat-istiadat masyarakat seperti upacara kematian di Toraja. Adapun atraksi buatan dapat dimisalkan Festival Danau Sentani Papua, Arung Jeram Sawangan Manado, Festival Komoro, dan sebagainya. Unsur lain yang melekat dalam atraksi adalah *hospitality*, yakni jasa akomodasi atau penginapan, restoran, biro perjalanan, dan sebagainya. (b) *Aksesibilitas* mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang menghubungkan wisatawan dari, ke, dan selama di daerah tujuan wisata. Akses ini tidak hanya menyangkut aspek kuantitas tetapi juga inklusif mutu, ketepatan waktu, kenyamanan, dan keselamatan. Moda transportasi layak ditawarkan adalah angkutan penumpang tersebut berangkat dan tiba tepat waktu di Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). (c) *Amenitas* adalah infrastruktur yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan pariwisata tetapi sering menjadi bagian kebutuhan wisatawan. Bank, pertukaran uang, telekomunikasi, usaha



persewaan (*rental*), penerbit dan penjual buku panduan wisata, seni pertunjukan (teater, bioskop, pub, dan lain-lain) dapat digolongkan ke dalam unsur ini.

Tidak banyak berbeda dengan Damanik dan Webber, Yoeti (1997) juga mengungkapkan hal yang hampir serupa bahwa dalam pengembangan wisata di suatu daerah harus meliputi, (a) Wisatawan, (b) Atraksi, (c) Transportasi yang Menurut Oka. A.Yoeti (1997) bahwa aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis, serta tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan tersebut. Kondisi transportasi itu seperti jalan, keberadaan moda angkutan, terminal, stasiun pengisian bahan bakar dan lainnya. (d) Fasilitas Pelayanan, Menurut Oka.A.Yoeti (1997) Fasilitas tersebut termasuk tour and travel operation (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya: restoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, bank, moneychanger, dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, informasi wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umum (kantor polisi dan pemadam kebakaran), pos penjagaan, rambu-rambu peringatan dan fasilitas perjalan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai). Dan terakhir (e) Informasi dan Promosi, Hal terakhir yang diperlukan adalah publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya, karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya, *pertama*, Berusaha memberikan kenuasan kepada wisatawan kedaerahannya dengan segala fasilitas dan potensi

milikinya. *Kedua*, Melakukan koordinasi di antara bermacam-macam lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk



mengembangkan industri pariwisata. *Ketiga*, Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.

B. Permintaan Pariwisata (*Demand of Tourism*)

Permintaan untuk pariwisata dilakukan tidak hanya oleh mereka yang berpartisipasi, tetapi juga bagi mereka yang tidak bepergian. Sebagai contohnya adalah kecenderungan melakukan perjalanan merupakan suatu indikator yang berguna dari partisipasi pariwisata, hal itu memberikan proporsi masyarakat yang benar-benar bergabung dalam kegiatan pariwisata. Perjalanan sering terkait pada jumlah rata-rata perjalanan yang dilakukan oleh mereka yang berpartisipasi dalam pariwisata, selama periode tertentu. Jadwal permintaan menandai hubungan antara permintaan pariwisata dan pengaruh khusus, seperti harga.

Menurut Mathieson dan Wall, (1982): yang mendefinisikan permintaan pariwisata sebagai sejumlah orang bepergian atau menginginkan perjalanan, atau menggunakan fasilitas pariwisata atau mendapatkan pelayanan pada tempat-tempat di tempat daerah tujuan wisata (DTW).

Dari sudut pandang kuantitatif, cukup masuk akal untuk berasumsi bahwa semakin besar jumlah penduduk negara sumber wisatawan, semakin banyak tentunya jumlah wisatawan yang akan bepergian, seandainya faktor-faktor lain seperti kelebihan pendapatan,, situasi politik tetap stabil. Tetapi ditinjau dari segi daerah tujuan wisata yang ada , faktor-faktor lain seperti pendeknya jarak dan faktor kemudahan pencapaian (*accessibility*) tetap akan sangat berpengaruh.

ala konsekuensi wisatawan ke suatu tempat tertentu, yang telah terbukti



dari pengamatan dan studi-studi statistik mengenai lalu lintas wisata selama beberapa tahun.

Permintaan pariwisata terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu : a) Permintaan yang efektif atau actual, adalah jumlah sebenarnya peserta pariwisata, mereka yang sesungguhnya melakukan perjalanan, hal ini merupakan bagian permintaan yang sangat umum dan mudah diukur dan kebanyakan statistik pariwisata merupakan permintaan yang efektif, b) Permintaan Tersamar, yaitu masyarakat yang tidak bepergian untuk beberapa alasan. Permintaan tersamar dapat dibedakan menjadi : pertama, permintaan potensial mengarah pada mereka yang akan bepergian pada beberapa hari mendatang, jika mereka mengalami keadaan perubahan, dan kedua jika dikarenakan terjadi perubahan lingkungan, seperti faktor keamanan, cuaca, iklim, dan isu terorisme, c) Tidak ada Permintaan, tergolong bagi mereka yang tidak menginginkan bepergian.

Pengkajian-pengkajian permintaan di berbagai pasaran wisata telah menunjukkan bahwa permintaan wisata menurut Salah Wahab (1997), ditandai dengan ciri-ciri khas tertentu, yaitu : Pertama, *Kekenyalan (Elasticity)*, kekenyalan permintaan wisata berarti seberapa jauh tingkat kelenturannya terhadap perubahan-perubahan struktur harga atau perubahan macam-macam keadaan ekonomi di pasaran. Titik awal munculnya permintaan wisata dengan keadaan ekonomi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan orang-orang memiliki kelebihan pendapatan dan lamanya hari-hari libur yang tetap dibayar karena pengeluaran wisata merupakan penyisihan sebagian anggaran pribadi dan keluarga, yang bersaing dengan barang-barang keperluan lainnya, seperti mobil

alat-alat rumah tangga atau bahkan untuk membeli rumah kedua di
 gan, maka dapat dipahami mengapa permintaan wisata menunjukkan



elastisitas langsung dengan jumlah pendapatan di satu pihak dengan biaya dipihak lain. Akibatnya, elastisitas permintaan ini sangat penting bagi para pejabat untuk pengambilan keputusan di negaranegara tujuan wisata, karena mereka harus mengetahui faktor korelasi antara suatu lonjakan harga dan suatu penurunan permintaan dan sebaliknya.

Kedua, *Kepekaan (Sensitivity)*, permintaan wisata sangat peka terhadap kondisi social politik dan terhadap perubahan metode penjualan. Situasi politik ini terjadi baik pada sumber wisatawan maupun di Negara tujuan wisata yang menjadi factor penentu berwisata.

Ketiga, *Perluasan(Expansi)*, pengaruh ekonomi di Negara-negara sumber wisatawan yang memungkinkan semakin luas kesempatan bagi rakyatnya untuk turut serta dalam kegiatan wisata. Keempat, *Musim (Season)*, baik Negara asal sumber wisatawan maupun dengan Negara tujuan atau DTW sering mengalami fluktuasi yang berlebihan.

Yoety (1996) menguraikan beberapa karakteristik dari permintaan wisatawan, sebagai berikut : 1) *Demandnya sangat Elastis*, Pada barang-barang yang sifatnya konkrit biasanya permintaan selalu dipengaruhi oleh faktor harga. Harga turun permintaan bertambah, dan sebaliknya harga naik, maka permintaan menjadi berkurang. Jadi elastisitas demand menunjukkan sampai di mana suatu macam barang terpengaruh oleh perubahan harga.

Demand dalam kepariwisataan dikatakan sangat elastis sekali, namun permintaannya tidak dipengaruhi oleh harga saja, tetapi juga oleh banyak faktor lainnya. Jadi harga bukan satusatunya faktor yang menentukan. Orang belum akan berkunjung ke suatu Negara di mana harga-harga menjadi murah, daya tarik untuk berkunjung ke sana tidak ada atau ada hal lain yang



menyebabkan orang tidak senang ke sana, 2) *Demandnya sangat Sensitif* , Demand dalam kepariwisataan sangat sensitive sekali terhadap kondisi sosial, politik yang dapat merubah keinginan orang untuk melakukan perjalanan pariwisata. Adanya gejolak sosial, seringnya terjadinya demonstrasi, perubahan-perubahan politik suatu Negara akan dapat menimbulkan keengganan orang-orang untuk mengunjungi Negara tersebut. Keadaan yang dimaksudkan tidak hanya selama dalam perjalanan, tetapi yang terpenting adalah pada Negara yang merupakan “Tourist Generating Countries” yang mempunyai hubungan baik dengan “*Tourist Receiving Countries*”. Dengan demikian wisatawan akan merasa aman di tempat yang dikunjunginya dan mendapat sambutan baik (*welcome*) oleh penduduk setempat. Bila penduduk setempat bersikap tidak bersahabat dengan pendatang, maka dengan sendirinya sukar bagi wisatawan untuk bersenang-senang ditempat yang dikunjunginya, 3) *Tergantung Waktu*, Dalam kepariwisataan yang terpenting adalah adanya waktu senggang (*leisure time*) bagi seseorang untuk melakukan perjalanan pariwisata. Walau seseorang cukup banyak uang, keadaan fisik cukup sehat, tetapi tidak ada waktu, maka perjalanan apa saja tidak mungkin dilakukan, 4) *Dipengaruhi olehmusim*, Suatu hal yang penting dalam “Tourist Demand” adalah faktor musim (*season*) yang dapat mempengaruhi orang untuk melakukan perjalanan. Oleh karena itu, kita melihat adanya waktu ramai (*peak sesason*) dan waktu sepi (*off-season*), 5) *Demand terpusat pada tempattempat tertentu*, bila kita memperhatikan ilmu bumi pariwisata (*geography of tourism*), baik di dalam maupun di luar negeri, kegiatan pariwisata terkonsentrasi pada tempattempat tertentu, khususnya pada daerah-daerah “*tourist resort*”.



2.1.5 Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik, Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) Golongan yang bekerja dan (2) Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) Golongan yang bersekolah, (2) Golongan yang mengurus rumah tangga dan (3) Golongan lain- lain yang menerima pendapatan, misalnya orang yang memperoleh tunjangan pensiun, bunga atas pinjaman dan sewa milik dan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis. Ketiga golongan bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.

Ada empat hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu: (a) Bekerja (employed) Jumlah orang yang bekerja sering dipakai sebagai petunjuk tentang luasnya kesempatan kerja. Dalam pengkajian ketenagakerjaan kesempatan kerja sering dipicu sebagai permintaan tenaga kerja. (b) Pencari kerja (unemployed) Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. Secara konseptual mereka yang dikatakan penganggur harus memenuhi persyaratan bahwa mereka juga aktif mencari pekerjaan. (c) Tingkat partisipasi

kerja, TPAK suatu kelompok penduduk tertentu adalah perbandingan jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam



kelompok yang sama. TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah, dan tingkat pendidikan. (d) Profil angkatan kerja, Profil angkatan kerja meliputi umur, seks, wilayah kota dan pedesaan dan pendidikan.

2.1.5.1 Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1985) “Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan”. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu dinamakan *derived demand*.

Pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi. Di dalam menganalisis mengenai permintaan perlulah disadari perbedaan di antara istilah “permintaan”

barang yang diminta”. Simanjuntak (1985) mendefinisikan yang dengan permintaan adalah keseluruhan hubungan antara berbagai



tingkat upah dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah yang diminta berarti banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu.

Menurut Sudarsono yang mengasumsikan bahwa permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu unit usaha. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, yaitu permintaan pasar akan hasil produksi dari suatu unit usaha, yang tercermin dari besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal seperti mesin atau alat proses produksi.

Mengacu pada uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan adanya perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh sektor usaha tertentu di suatu wilayah. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor.

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, di mana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price taker*). Dalam hal memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada : (1) tambahan hasil marjinal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan

bekerja atau istilah lainnya disebut *Marginal Physical Product* dari tenaga (*MPP_L*), (2) penerimaan marjinal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh



pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau istilah lainnya disebut *Marginal Revenue (MR)*. Penerimaan marjinal di sini merupakan besarnya tambahan hasil marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga $MR = VMPP_L = MPP_L \cdot P$, dan (3) biaya marjinal, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang pekerja, dengan kata lain upah karyawan tersebut. Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih besar dari biaya marjinal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemberi kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama MR lebih besar dari tingkat upah.

2.1.5.2. Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja di definisikan sebagai persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Simanjuntak (2005). Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang dipekerjakan menurun, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, elastisitas permintaan tenaga kerja juga negatif. Besar kecilnya permintaan tergantung dari empat factor yaitu, *pertama*, Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal. Semakin kecil kemungkinan mensubstitusikan modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja. Ini juga tergantung dari jenis teknologi. Bila suatu teknik produksi menggunakan modal dan tenaga kerja dalam perbandingan yang tetap maka perubahan tingkat upah tidak mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja paling sedikit dalam jangka pendek. Elastisitas semakin kecil bila keahlian atau ketrampilan golongan tenaga kerja itu semakin tinggi dan semakin khusus.

dua, Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Salah satu pengusaha adalah membebankan kenaikan tingkat upah kepada



konsumen dengan menaikkan harga jual barang hasil produksi di pasar. Kenaikan harga jual ini menurunkan jumlah permintaan masyarakat akan hasil produksi. Selanjutnya turunnya permintaan masyarakat terhadap hasil produksi mengakibatkan penurunan dalam jumlah permintaan akan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja. *Ketiga*, Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi, elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya karyawan (labor cost) terhadap biaya produksi keseluruhan juga besar (total cost).

Keempat, Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya, elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan dari bahan-bahan pelengkap dalam produksi seperti modal, tenaga listrik, bahan mentah, dan lain- lain. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja dan sumber-sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Semakin banyak kapasitas dan jumlah mesin yang dioperasikan, semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk itu. Semakin banyak factor pelengkap seperti tenaga listrik yang perlu dipergunakan atau bahan mentah yang perlu di olah, semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk menanganinya. Jadi besarnya elastisitas penyediaan factor pelengkap dalam produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

2.1.5.3. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja merupakan bagian dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan



transformasi dari input atau masukan (faktor produksi) ke dalam output atau keluaran.

Dalam menganalisis penentuan penyerapan tenaga kerja, diasumsikan bahwa hanya ada dua input yang digunakan, yaitu modal (K) dan tenaga kerja (L). Tenaga kerja (L) diukur dengan tingkat upah yang diberikan kepada pekerja (W) sedangkan untuk modal (K) diukur dengan tingkat suku bunga (r). Hukum permintaan tenaga kerja pada hakekatnya adalah semakin rendah upah tenaga kerja maka semakin banyak permintaan tenaga kerja tersebut. Apabila upah yang diminta besar, maka pengusaha akan mencari tenaga kerja lain yang upahnya lebih rendah dari yang pertama. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor, yang di antaranya adalah besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, upah dan *skill* yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Industri Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja

Industri Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja Dapat dikatakan bahwa industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena melalui pembangunan industry tersebut diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi jelasnya pembangunan industri akan dapat menciptakan kesempatan kerja yang sekaligus dapat menampung angkatan kerja yang terus menerus meningkat setiap tahunnya.

Secara umum ada beberapa keuntungan yang diharapkan dapat dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain sebagai berikut:
tan pertumbuhan urbanisasi sebagai akibat adanya pembangunan



prasarana dan sarana kepariwisataan dalam suatu wilayah atau daerah tujuan, kegiatan beberapa industri yang berhubungan dengan pelayanan wisatawan seperti perusahaan angkutan, akomodasi, perhotelan, restoran, kesenian daerah, perusahaan meubel dan lain-lain, meningkatnya produk hasil kebudayaan disebabkan meningkatnya konsumsi oleh para wisatawan, menyebabkan pemerataan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, salah satu usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan penghasilan devisa negara, memperluas pasaran barang-barang yang dihasilkan dalam negeri. Pariwisata dapat memulihkan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta dapat menghilangkan prasangka dan kepicikan, membantu terciptanya saling pengertian antara penduduk yang datang dengan penduduk negara yang dikunjunginya.

Dalam perencanaan penyerapan tenaga kerja, dengan melalui penambahan modal dalam setiap aktifitas pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan penyediaan lapangan kerja yang cukup besar. Penyediaan lapangan kerja tersebut dapat dilakukan dengan menghasilkan barang dan jasa dimana kegiatan tersebut memerlukan faktor-faktor produksi sehingga dengan adanya proses produksi dapat menciptakan lapangan kerja.

Nizar (2011) "Sektor pariwisata berpotensi mendorong pertumbuhan sektor swasta dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan penerimaan negara dari pajak disamping itu, sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dorongan ini muncul dikarenakan pariwisata memiliki keterkaitan (linkages), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sejumlah industri lain di dalam perekonomian". Sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata antara lain adalah agen

n, operator wisata, hotel serta restoran, sedangkan yang bersifat tidak antara lain adalah dengan sektor perbankan, perusahaan asuransi,



transportasi, budaya dan layanan lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perjalanan dan pariwisata. Demikian pula kesimpulan yang dibuat oleh International Union of Official Travel Organization (IUOTO) dalam Roma Convention tahun 1963 menyatakan bahwa pembangunan pariwisata dapat mengembangkan daerah-daerah miskin dan semula terpencil menjadi lokasi industri baru. Kesimpulan IOUTO tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan juga penyerapan tenaga kerja.

2.2.2. Pengeluaran Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kebijakan fiskal pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah diyakini berdampak terhadap peningkatan aktiitas perekonomian yang pada gilirannya akan berdampak terhadap meningkatnya kesempatan kerja, beberapa hasil penelitian mendukung pernyataan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sequeira dan Campos (2005) menemukan di sektor pariwisata, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap perekonomian jangka panjang di beberapa kelompok seperti negara maju, Asia, Afrika, Amerika Latin, negara berspesialisasi pariwisata dan negara kepulauan. Okafor dan Kennet (2016) yang menyelidiki tentang hubungan antara pengeluaran publik dan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang intens merupakan faktor tunggal paling penting dari mendorong pertumbuhan ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja. Hasil tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et. Al. (2017) yang menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan penyerapan tenaga kerja di

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran ini adalah peran untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil, penciptaan lapangan



kerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi. Pada saat yang sama, pendidikan juga dianggap sebagai investasi modal manusia untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Dengan kata lain, pendidikan dianggap sebagai sumber kekayaan di masyarakat. Berdasarkan temuan dalam makalah ini, disarankan bahwa studi tentang dampak pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan pekerjaan diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irsan et al (2015) yang menyelidiki dampak pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Investasi dan Ketenagakerjaan baik secara langsung, tidak langsung atau total. Penelitian tersebut didukung oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Holdon dan Sparrman (2015) yang menyelidiki dampak pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di 20 negara OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan satu persen PDB dan mengurangi pengangguran sekitar 0,3 persen. Penelitian yang dilakukan oleh Rendahl (2014) yang melihat hubungan antara kebijakan fiskal dan pengangguran, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah meningkatkan output dan menyebabkan penurunan pengangguran.

2.2.3. Infrastruktur dan Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah industri besar dan sedang memiliki peran yang penting dalam layanan jasa transportasi. Dimana di setiap industri membutuhkan alat untuk mendistribusikan baik barang maupun jasa yang dihasilkan atau input yang



dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa seiring meningkatnya proses industrialisasi terutama di dalam industri besar dan sedang akan meningkatkan permintaan jasa distribusi barang seperti pengiriman barang atau jasa ke konsumen atau sebaliknya pengiriman barang input dari instansi lain. Semakin meningkatnya kebutuhan akan distribusi tersebut, maka permintaan akan tenaga kerja untuk alat transportasi tersebut semakin meningkat.

Jumlah armada angkutan pada keempat provinsi memiliki peran penting dalam menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Namun angkutan itu sendiri tidak dapat berfungsi sesuai kegunaannya tanpa adanya tenaga penggerak alat transportasi tersebut. Sehingga diperlukan adanya tenaga kerja penggerak, dengan kata lain bahwa armada angkutan memiliki pengaruh yang penting dalam penyerapan tenaga kerja jasa angkutan sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua. Karena semakin tingginya tingkat permintaan jasa angkutan akan mempengaruhi permintaan alat angkutan tersebut sehingga memiliki dampak yang langsung terhadap permintaan tenaga kerja penggeraknya.

Dalvi dan Derma (1984), yang melihat hubungan antara transportasi dan penyerapan tenaga kerja di India, Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa pada studi kasus india diketahui bahwa sektor transportasi mempekerjakan lebih dari 20 juta orang di India, yang hampir 6 juta di antaranya bekerja di transportasi jalan raya.

2.2.4. Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja



alam pembangunan ekonomi, sumber daya modal memegang peranan
Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau

suatu daerah sangat ditentukan oleh meningkatnya akumulasi modal (investasi), terutama di sektor riil atau sektor produksi barang dan jasa. Investasi yang meningkat baik di sektor produksi bahan mentah maupun proses nilai tambah akan mendorong kesempatan kerja yang lebih luas yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau wilayah. Dengan adanya akumulasi modal akan meningkatkan di laksanakannya spesialisasi sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat yang berdampak terhadap bertambahnya investasi.

Pandangan yang mendukung pernyataan di atas dimulai dari temuan penelitian yang dilakukan oleh Eugenio-Martin *et. al.* (2004) yang menemukan pengaruh investasi pada hubungan kausalitas pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menyerap tenaga kerja di negara Amerika Latin. Shaari *et. al.* (2012) yang menyelidiki dampak investasi asing terhadap pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan konsistensi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeb *et. al.* (2014) yang melihat hubungan antara investasi asing dan pengangguran di Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing langsung berdampak terhadap penurunan pengangguran di Pakistan. Penelitian yang dilakukan oleh Schmerer (2012) yang menyelidiki tentang dampak investasi asing langsung terhadap tingkat pengangguran, hasil

menunjukkan bahwa investasi asing langsung berdampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran.



Analisis ekonomi Harrod dan Domar mengatakan bahwa, apabila penduduk bertambah maka pendapatan per kapita akan berkurang, kecuali bila pendapatan riil bertambah. Selanjutnya bila angkatan kerja bertambah, maka output juga harus bertambah untuk mempertahankan kesempatan kerja penuh dan bila ada investasi maka pendapatan riil juga harus bertambah untuk mencegah adanya kapasitas menganggur.

2.3. Studi Empiris

Berbagai penelitian telah dilahirkan dari para peneliti dengan focus kajian apakah ada hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan sector pariwisata yang selanjutnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata diantaranya penelitian Hunt (1990) yang melihat hubungan antara pertumbuhan anggaran dan pangsa pasar pengeluaran pariwisata, bahwa dalam waktu 10 tahun antara 1975-1976 dan 1984-1985, dia menemukan bahwa negara-negara yang memiliki pertumbuhan anggaran yang paling kontras mendapatkan pertumbuhan pangsa pasar yang positif dan sebaliknya, negara-negara yang pertumbuhan anggarannya rendah telah kehilangan pangsa pasarnya. Kemudian Simundic *et al.* (2016) tentang pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Latin dan Karibia. Total negara yang diteliti ada 33 negara dengan periode waktu dari 2000 sampai 2014, Variabel yang digunakan GDP riil, pertumbuhan pariwisata per kapita, pengeluaran pemerintah, investasi, *human capital* dan kestabilan politik. Hasil yang didapat semua variabel signifikan dan berpengaruh positif.

Suhel dan Abdul Bashir (2017) yang menemukan bahwa secara parsial, variabel yang mempengaruhi jumlah wisatawan berkunjung ke Sumatera Selatan, pertumbuhan ekonomi, nilai tambah sektor pariwisata, investasi, dan belanja pemerintah sektor pariwisata dengan taraf signifikansi masing-



masing variabel sebesar 5%, pada temuan lain yang dimuat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie dalam Riska (2013) menyatakan bahwa ditahun 1990 Prancis menerima wisatawan mancanegara sebanyak 52,5 juta, Banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Prancis disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, akomodasi dan juga Transportasi yang merupakan aspek penting dalam industri pariwisata Prancis dikarenakan berhubungan dengan bagaimana cara wisatawan dapat mencapai daerah tujuan wisata dan bagaimana sarana transportasi tersebut bisa memfasilitasi wisatawan selama berwisata.

Jameel Khadaro dan Boopen Seetanah (2007) pada kasus Mauritius yang menemukan bahwa Banyaknya jumlah wisatawan khususnya wisatawan Eropa, Amerika dan Asia yang datang ke Mauritius disebabkan oleh berkembangnya transportasi yang merupakan aspek penting dalam industri pariwisata Negara tersebut, dikarenakan transportasi berhubungan dengan bagaimana cara wisatawan dapat mencapai daerah tujuan wisata dan bagaimana sarana transportasi tersebut bisa memfasilitasi wisatawan selama berwisata.

Siddiqui dan Rajesh (2004) meneliti tentang nilai ekonomi pada industri pariwisata di India. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pariwisata bisa menjadi sektor yang penting di India, kaitannya dengan kontribusi yang diberikan pada GDP dan kesempatan kerja. Penelitian ini juga dilakukan untuk mempelajari dampak dari kenaikan nilai tambah sektor pariwisata terhadap GDP secara keseluruhan dan juga terhadap kesempatan kerja di sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 5,8% terhadap GDP dan 8,3% terhadap kesempatan kerja, yang berarti pariwisata masih menjadi salah satu industri penting di India.



Studi lain juga menunjukkan bukti yang kuat tentang hubungan positif antara pertumbuhan industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga diantaranya Schubert Taleghani (2010) untuk kasus Iran yang menyatakan bahwa pariwisata memiliki korelasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Lalu laporan yang dikeluarkan oleh WTTC (World Tourism and Travel Council) yang menyebutkan bahwa Di Cina untuk tahun 2016, pariwisata secara langsung telah mendukung 23.680.500 pekerjaan (3,1% dari total pekerjaan). Sub Sahara Africa, pariwisata secara langsung mendukung 6.171.000 pekerjaan (2,4% dari total pekerjaan). Untuk kasus Maladewa pariwisata secara tidak langsung memberikan sumbangsih sekitar 43,6% dari total pekerjaan (78.500 pekerjaan). Di Jepang, 6,9% dari total pekerjaan (4.474.000 pekerjaan). Zimbabwe, 5,2% dari total pekerjaan (393.000 pekerjaan). Selandia Baru, 23,6% dari total pekerjaan (583.500 pekerjaan). Di Inggris pada tahun 1973 industri pariwisata menampung sekitar 1.500.000 orang tenaga kerja, Meksiko ditaksir menampung 250.000 orang yang langsung bekerja di sektor industri pariwisata. Di Amerika Serikat ada sekitar 8.750.000 orang bekerja di sektor industri pariwisata.

Di Kepulauan Bahama 70% dari seluruh tenaga kerja bekerja di sektor perhotelan dari gambaran-gambaran di atas nampak bahwa perkembangan pariwisata memperluas kesempatan kerja. Penciptaan kesempatan kerja yang bersifat langsung dan sangat menonjol adalah di bidang perhotelan suatu industri jasa yang bersifat padat karya. (Spillane 1985:91).

